

Newsletter Pusdatin



Daftar Isi

- Fokus Kelola Data Geospasial Kementerian Pertanian Raih Bhumandala Awards 2024, Halaman 1
- Kementan Raih Terbaik Pertama Anugerah Anindhita Wistara Data, Halaman 3
- Dorong Swasembada Pangan: Pusdatin Kementan Komitmen Berkolaborasi Dengan Kemenko Pangan, Halaman 4
- Pelatihan *General Course* Proyek Hibah EPIS, Halaman 6
- Sertifikat ISO 27001:2022 Pusdatin Pertanian: Menyulam Kewaspadaan Maya Dalam Tindakan Nyata, Halaman 7
- Menteri Pertanian Hadiri Launching Gugus Tugas Polri Dukung Ketahanan Pangan, Halaman 9
- Bulog Diperkuat, Swasembada Semakin Dekat, Halaman 10
- Indonesia Memastikan Akses Terhadap Makanan Bergizi Untuk Semua Pada Peluncuran Survei Ekonomi OECD, Halaman 11

Mohon Kesediannya Untuk
Mengisi Survei Kepuasan



bit.ly/surveipusdatin

Fokus Kelola Data Geospasial, Kementerian Pertanian Raih Bhumandala Awards 2024

Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan) baru-baru ini memperoleh penghargaan Bhumandala Ariti atas kontribusinya dalam penyusunan peta lahan peternakan skala 1:50.000. Penghargaan ini diberikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya Kementan dalam pemetaan sumber daya alam yang dapat menunjang pengelolaan peternakan di Indonesia secara lebih efektif dan berkelanjutan. Penghargaan tersebut dilaksanakan di Graha Studio Metro TV, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Peta lahan peternakan skala 1:50.000 adalah peta yang menggambarkan distribusi dan potensi lahan yang cocok untuk kegiatan peternakan di seluruh Indonesia, dengan rasio skala 1:50.000, artinya satu sentimeter di peta mewakili 50.000 sentimeter di lapangan. Peta ini sangat penting untuk memetakan lokasi yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan peternakan, baik untuk sapi, kambing, domba, maupun jenis ternak lainnya.

Penyusunan peta ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementan, BIG, serta para ahli geospasial yang bekerja sama untuk mengumpulkan data yang akurat dan relevan. Dengan informasi ini, pemangku kebijakan dan pelaku usaha peternakan dapat membuat keputusan yang lebih tepat mengenai penggunaan lahan, distribusi pakan, serta pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan produktivitas sektor peternakan.

Penghargaan Bhumandala Ariti diberikan kepada Kementankarenakesuksesannya dalam memanfaatkan teknologi geospasial dalam pengelolaan peternakan. Peta lahan peternakan ini memiliki banyak manfaat, di antaranya:

Tim Redaksi

Penanggung Jawab

**Kepala Pusat Data dan
Sistem Informasi Pertanian**

Redaktur

Kepala Bagian Umum

Editor

**Dr. Nugroho Setyabudhi, S.kom, MM
Ir. Wieta Barkah Komalasari, M.Si
Roydatul Zikria, S.Si, MSE
Suyati, S.Kom**

Fotografer

**Sri Lestari, SE
Iswadi**

Desain Grafis

**Dhanang Susatyo, SE
Rizky Purnama R, S.Kom**

Sekretariat

**Apriadi Setiawan, S.Kom, MT
Cahyani Wartianingsih, S.Kom
Hotlanis Mangatur S, S.Kom
Didik Pratama Saputra, S.Kom
Priatna Sari
Nur Hikmah, S.Stat
Rahma Andany, S.Kom
Marwati
Agung Mahendra, S.Kom
M. Eko Darwanto, ST**

Alamat Redaksi



**PUSAT DATA DAN
SISTEM INFORMASI PERTANIAN
Jl. Harsono RM No. 3 Gd D Lantai IV,
Ragunan - Jakarta 12550
Telp : 021- 78842029
e-mail : newsletter@pertanian.go.id**

Pertama, Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Dengan adanya peta ini, Kementan dapat mengetahui lokasi-lokasi yang ideal untuk pengembangan peternakan, yang pada akhirnya dapat mengoptimalkan penggunaan lahan.

Kedua, Mendukung Kebijakan Sektor Peternakan: Informasi yang terkandung dalam peta ini membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, serta dalam menentukan daerah mana yang membutuhkan perhatian lebih terkait pengembangan sektor peternakan.

Ketiga, Mempermudah Perencanaan dan Investasi: Bagi pelaku usaha peternakan dan investor, peta ini memberikan gambaran jelas mengenai potensi lahan yang dapat digunakan untuk investasi peternakan, sehingga dapat mempercepat proses perencanaan dan pembangunan.

Keempat, Dukungan Terhadap Ketahanan Pangan: Dengan pengelolaan lahan yang lebih efisien dan terarah, sektor peternakan dapat berkembang lebih baik, mendukung ketahanan pangan nasional dengan memastikan pasokan produk peternakan yang berkualitas dan mencukupi kebutuhan masyarakat.

Penghargaan ini juga menjadi dorongan bagi Kementan untuk terus berinovasi dalam penggunaan teknologi geospasial guna mendukung sektor pertanian dan peternakan. Ke depan, diharapkan peta-peta serupa dapat dikembangkan dengan skala yang lebih detail dan mencakup berbagai aspek penting, seperti peta kualitas tanah, distribusi pakan ternak, serta infrastruktur pendukung untuk peternakan.

Dengan adanya pengakuan ini, Kementerian Pertanian semakin termotivasi untuk memperkuat sektor peternakan Indonesia. Melalui pemanfaatan data geospasial yang akurat dan upaya bersama berbagai pihak, diharapkan sektor peternakan Indonesia dapat tumbuh dengan lebih pesat, berkelanjutan, dan mampu memenuhi kebutuhan pangan domestik serta ekspor.

Penghargaan Bhumandala Ariti yang diterima oleh Kementerian Pertanian merupakan bukti komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk kemajuan sektor peternakan. Dengan peta lahan peternakan skala 1:50.000, Indonesia kini memiliki landasan

yang kuat untuk merancang kebijakan yang lebih baik, mendukung produktivitas peternakan, dan memperkuat ketahanan pangan di masa depan.



Kapusdatin mewakili Kementan dalam penganugerahan Bhumandala Awards 2024

Penulis: Dhanang S.

Kementan Raih Terbaik Pertama Anugerah Anindhita Wistara Data

Sebagai komitmen dalam penyediaan data statistik yang berkualitas, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) telah berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan statistik sektoral sejak tahun 2022. Pelaksanaan statistik sektoral di masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) dievaluasi oleh BPS RI selaku Pembina Data Statistik melalui pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). EPSS adalah suatu proses penilaian yang dilakukan BPS secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral.

“EPSS bertujuan untuk mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral, meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah”, papar Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Amalia menambahkan bahwa EPSS juga

bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dan rekomendasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral di K/L/D.

Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Indeks ini, selain disajikan secara umum, juga disajikan menurut domain dan aspek.

“IPS merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi General untuk seluruh instansi pemerintah. IPS juga menjadi ukuran dalam pencapaian pelaksanaan Satu Data Indonesia dan penyelenggaraan urusan statistik di Tingkat pemerintahan daerah,” tambah Plt. Kepala BPS sekaligus Deputy Bidang Ekonomi Bappenas.



Penyerahan Piagam Penghargaan EPSS 2024 oleh Wakil Ketua Komisi XI (tengah) dan Plt. Kelapa BPS (kanan) kepada Kapusdatin (kiri)

dilaksanakan pada seluruh instansi pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral. Penilaian EPSS dilaksanakan melalui berbagai tahapan, mencakup penilaian mandiri, penilaian dokumen dan penilaian interviu, sedangkan penilaian visitasi dilaksanakan hanya jika diperlukan.

Dengan berpedoman pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang EPSS, BPS telah melakukan evaluasi atas penyelenggaraan statistik sektoral tahun 2024 pada Kementerian Pertanian. Dari hasil evaluasi tersebut, Kementerian Pertanian memperoleh anugerah Anindhita Wistara Data. Anugerah ini diberikan oleh BPS kepada pihak-pihak eksternal (K/L/D) yang telah berkontribusi dan berkolaborasi dengan BPS selama tahun 2024.

“Anindhita Wistara Data merupakan wujud apresiasi BPS atas komitmen dan capaian K/L/D dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS)”, kata Plt. Kepala BPS.

Pada Kamis (26/09/2024) bertempat di Hotel Grand Mercure Jakarta Kemayoran, Kementerian Pertanian untuk pertama kalinya menorehkan prestasi nasional dengan meraih penghargaan Anindhita Wistara Data dari BPS sebagai terbaik 1 Kategori Kementerian. Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Pusdatin Kementan Intan Rahayu. Pemberian penghargaan tersebut dilaksanakan berbarengan dengan peringatan Hari Statistik Nasional (HSN) 2024 yang dihadiri oleh Komisi XI, Kemenpan RB, perwakilan K/L serta perwakilan BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota.



Penyerahan Plakat Penghargaan EPSS 2024 oleh Deputi Reformasi Birokrasi Kemenpan RB (kiri) kepada Kapusdatin (kanan)

“Capaian ini merupakan prestasi yang membanggakan bagi Kementerian Pertanian. Prestasi ini merupakan wujud dari kepedulian pimpinan dalam penyelenggaraan statistik sektoral di Kementan serta kolaborasi yang harmonis dengan BPS dalam pengelolaan data pertanian”, ujar Intan.

Hasil pengukuran tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral tahun 2024 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Statistik (IPS) di Kementerian Pertanian sudah sangat baik dengan nilai skor 3,67. Tingginya IPS tersebut tidak terlepas dari implementasi Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) di lingkup Kementan. Selain itu, penjaminan terhadap kualitas data pertanian yang dikumpulkan oleh Produsen Data dan pelaksanaan proses bisnis statistik yang sesuai dengan panduan *General Statistical Business Process Model* (GSBPM).

“Profesionalitas dan pengorganisasian statistik yang baik, serta dukungan SDM yang memadai dan kapabel di Kementan menunjukkan bahwa kolaborasi penyelenggaraan statistik dan kolaborasi dengan BPS selaku Pembina Data telah berjalan lancar dan baik”, kata Intan. Ia menambahkan bahwa selama ini Kementan telah melibatkan seluruh *stakeholder* agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan.



Perwakilan tim EPSS Pusdatin, Kementerian Pertanian

Penulis : Roydatul Zikria



Dorong Swasembada Pangan: Pusdatin Kementan Komitmen Bekerja Sama Dengan Kemenko Pangan

Dalam mendukung upaya Swasembada Pangan, Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Pertanian (Pusdatin Kementan) berkomitmen tinggi dan siap berkolaborasi dalam penyusunan dashboard Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan). Hal ini terlihat dari rapat koordinasi penyusunan Dashboard Kemenko Pangan yang dipimpin oleh Koordinator

Pelaksana Tugas Sehari-hari Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kasan, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan, di Menara PNM Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Rapat yang dihadiri oleh jajaran Kemenko Pangan serta perwakilan Kementerian/Lembaga dibawah koordinasi Kemenko Pangan (Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Badan Pangan Nasional) ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dalam penyusunan dashboard Kemenko Pangan sebagai langkah strategis dalam pemantauan data pangan secara terpadu dan terintegrasi.



Rapat pembahasan dashboard Kementerian Koordinator Bidang Pangan

Dalam sambutan sekaligus pembukaan rapat disampaikan Kasan bahwa, dashboard ini nantinya diharapkan mampu menyajikan data prioritas terkait pangan dari Kementerian/Lembaga dibawah koordinasi Kemenko Pangan, khususnya dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenko Pangan, yaitu Swasembada Pangan 2028 serta Program Makan Bergizi Gratis. “ Dashboard ini akan menjadi salah satu elemen penting untuk mencapai dua Indikator IKU Kemenko Pangan, serta pengawalan program prioritas nasional yaitu Swasembada Pangan pada 2028 dan Program Makan Bergizi Gratis”, ujar Kasan.

Pada kesempatan yang diberikan, Perwakilan dari Kementan, Ketua Kelompok Data Komoditas Pusdatin Kementan, Anna Astrid Susanti menyampaikan bahwa Kementan siap untuk berkontribusi dalam penyusunan dashboard dengan mensupport kebutuhan data pertanian yang diperlukan. Lebih lanjut Anna menyampaikan bahwa sebagai langkah awal,

perlu diidentifikasi terkait kebutuhan data pangan yang perlu disediakan pada setiap Kementerian/Lembaga dibawah koordinasi Kemenko Pangan serta mekanisme berbagi pakai datanya.

Anna juga menekankan bahwa perlu adanya sinergi antar kementerian/lembaga diluar dari koordinasi Kemenko Pangan khususnya dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian. “Sebagai masukan, dalam penyusunan dashboard ini sebaiknya juga melibatkan BPS, BIG, serta Kementerian PUPR yang juga mendukung dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian. Kementerian PUPR misalnya, terkait optimalisasi irigasi pertanian”, urai Anna.

Sementara itu dalam rapat juga dipaparkan secara singkat mengenai rancangan diagram causal loop pemodelan Sistem Transformasi Pangan mendukung IKU Kemenko Pangan berdasarkan Undang Undang Pangan No.18 Tahun 2012. Data yang dibutuhkan dari pemodelan ini diantaranya terkait indikator: a). Daya beli pangan: disparitas antar kelompok pendapatan ; b). Distribusi dan pemasaran; c). Potensi pangan dan budaya lokal; d). Kebutuhan konsumsi pangan dan gizi; e).Konsumsi Pangan dan Gizi; dan f).Infrastruktur pangan.

PT Permodalan Nasional Madani (PNM), sebagai mitra BUMN, turut dilibatkan dalam pengembangan dashboard Kemenko Pangan. Dalam pelaksanaannya, PNM ditunjuk sebagai badan yang akan menangani penyusunan dan pengelolaan dashboard tersebut. Sebagai penutup dari rangkaian pertemuan, peserta diajak untuk meninjau langsung dashboard yang saat ini dikelola oleh PNM sebagai gambaran visualisasi data dan informasi dashboard Kemenko Pangan yang nantinya akan dibangun.



Contoh dashboard yang dikembangkan PT. PNM

Penulis : Nur Hikmah

Pelatihan *General Course* Proyek Hibah EPIS

Tahun 2023-2024 Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) Kementerian Pertanian bekerjasama dengan *the Korea Agency of Education, Promotion and Information Service in Food, Agriculture, Forestry and Fisheries* (EPIS) Korea Selatan melalui mekanisme proyek hibah barang dan jasa dengan judul *Establishing Real-time ASEAN Food Security Information System and Developing Human Resource in Republic of Indonesia*. Proyek ini merupakan kelanjutan dari proyek fase pertama pada tahun 2016 dan fase kedua pada 2021. Pada fase pertama proyek hibah dilaksanakan untuk pengembangan aplikasi pelaporan data tebu dari pabrik gula ke Kementerian Pertanian berbasis android. Pada fase kedua proyek dilaksanakan untuk penyempurnaan aplikasi pelaporan data tebu berbasis web. Selain itu, pada fase kedua juga dilaksanakan *pilot project* pemanfaatan remote sensing untuk estimasi produksi tebu di Cirebon, Jawa Barat.

Memasuki fase ketiga proyek hibah ini bertujuan untuk pengumpulan data dan estimasi produksi tebu berbasis remote sensing di Provinsi Jawa Barat meliputi 6 kabupaten yaitu Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka, Subang dan Sumedang. Proyek

hibah fase ke-3 ini telah berjalan sejak Juni 2023 dan akan selesai pada November 2024.

Pelaksanaan kerjasama antara Pusdatin dengan EPIS ditutup dengan melaksanakan pelatihan *General Course* Proyek Hibah EPIS yang dilaksanakan pada tanggal 4 – 6 November 2024 bertempat di Ra Premiere Simatupang, Jakarta.

Peserta pelatihan berasal dari perwakilan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, perwakilan dari ID Food dan Pusdatin, dengan total jumlah peserta pelatihan mencapai 70 orang. Pelatihan ini dibuka secara resmi oleh Deputy AFSIS Manager Charaporn Cantorn via daring (zoom), dan ditutup oleh Kapusdatin.

Pada hari pertama pelatihan mencakup materi : (1) *Introduction Project* yang dibawakan oleh Mr. Jason Wye; (2) *Understanding and Utilizing Spatial Information* yang dibawakan oleh Mr. Kang Seok-Chan yang terdiri dari, *Spatial Information, Form of Spatial Information, Spatial Information System, Spatial Information Services, Spatial Information Convergence Technology, 3D Spatial Information* dan *Smart City*; (3) *Case Studies of Spatial Information Utilization in Agriculture* yang dibawakan oleh Mr. Kim Hyun-Jin.



Peserta Pelatihan *General Course* Proyek Hibah EPIS Korea Selatan



Kim Hyun-Jin ahli geospasial Korea Selatan memaparkan model estimasi produktivitas tebu

Pada hari ke dua materi yang disampaikan adalah : (1) *Case Study of Yield Prediction Model* dengan pemateri adalah Mr. Kim Hyun-Jin; (2) *How to Use the Harvest Prediction System and the Prediction Result Utilization System* oleh Mr. Kang Seok-Chan dan (3) *Satellite Image Analysis Overview* oleh Mr. Lee Kyu-Hyun.

Pada hari ke tiga materi yang disampaikan adalah : (1) *Overview of Drone Video Analysis* yang dibawakan oleh Mr. Yang Jeong-Hoon; (2) *Overview of Predictive Model Development* oleh Mr. Lee Kwang-Se; (3) *Closing Ceremony* oleh Mr. Yang Jeon-Hoon.



Kapusdatin bersama Manager Proyek Jason Wee dan Seluruh peserta telah menyelesaikan Pelatihan General Course

Penulis: Dhanang S.



Sertifikat ISO 27001:2022 Pusdatin Pertanian: Menyulam Kewaspadaan Maya Dalam Tindakan Nyata

Seiring dengan pesatnya era digitalisasi, keamanan informasi dan perlindungan data pribadi menjadi suatu keharusan yang seiring berjalan, termasuk di Kementerian Pertanian. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) berkewajiban dalam pengelolaan data yang transparan dan harus tetap aman, namun menutup segala akses yang memungkinkan data tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi di lingkup Kementerian Pertanian, maka semakin meningkat dan kompleks pula ancaman keamanan data. Paling tidak terdapat tiga tantangan yang akan dihadapi diantaranya adalah, serangan siber, penyalahgunaan akses dan kesalahan manusia itu sendiri.

Menyikapi berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU-PDP), Kementerian Pertanian, dalam hal ini Pusdatin, juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data.

Penerapan UU-PDP dapat dimulai dengan melakukan beberapa strategi, diantaranya:

Pertama, penguatan infrastruktur teknologi informasi

Lingkungan yang mendukung sistem aplikasi berikut databasenya, perlu untuk dipastikan telah dilakukan keamanan yang berlapis. Dengan begitu, kebutuhan untuk enkripsi data, sistem keamanan siber, firewall dan lain sebagainya menjadi keharusan yang diprioritaskan.

Kedua, pengendalian penuh terhadap akses data dan informasi

Penerapan pembatasan akses juga menjadi hal berikutnya yang perlu untuk diterapkan. Tugas dan fungsi terhadap petugas yang diberikan akses terhadap data-data yang sensitif dan krusial, harus ditentukan dengan jelas.

Ketiga, sosialisasi terkait keamanan informasi

Faktor manusia yang mengakses data dan informasi menjadi penentu yang tak kalah pentingnya untuk diberikan pengetahuan terkait keamanan data dan langkah-langkah yang harus dilakukan, agar lebih menyadari bahwa serangan siber selalu mengintai setiap waktu. Pusdatin perlu secara rutin untuk melakukan pembekalan tersebut kepada pegawai lingkup Kementan.

Keempat, audit berkala

Selanjutnya jika hal-hal tersebut diatas sudah dipastikan telah dilakukan, maka tindakan audit secara berkala juga harus dilakukan. Kegiatan ini dilaksanakan guna memastikan bahwa potensi risiko keamanan data dan kepatuhan terhadap standar dan regulasi terkait telah dilaksanakan. Terkait dengan poin 4 tersebut, pada 14 sampai dengan 15 November 2024 telah dilaksanakan audit Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001:2022 di Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin). Kegiatan ini diikuti oleh Tim Audit dari PT. CBQA dan seluruh karyawan terkait Keamanan Informasi dari Pusdatin. Selain dilaksanakan secara tatap muka, kegiatan audit ini juga dilakukan secara virtual dengan Biro Organisasi dan Kepegawaian dan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura.

Dengan mengimplementasikan ISO 27001:2022, Pusdatin tidak hanya meningkatkan keamanan informasi elektronik, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan data pribadi sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27/2002 tentang Pelindungan Data Pribadi. Diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan ini, Pusdatin dapat lebih memperkuat keamanan data pribadi serta meningkatkan kepercayaan publik. Adapun hasil audit ini adalah Pusdatin direkomendasikan mendapatkan sertifikat ISO 27001 versi 2022.

Mengingat begitu berharganya data dan informasi di abad 21 ini, keamanan informasi berikut juga perlindungan data pribadi di lingkungan Kementerian Pertanian menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Semoga dengan adanya kepastian keamanan data di era digitalisasi yang semakin gencar dan masif saat ini, dapat mendukung untuk terciptanya program

Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel, dan modern. Kiranya kewaspadaan dalam mengakses informasi di dunia digital perlu untuk selalu dibiasakan, dibandingkan dengan terbuai dalam kenyamanan belaian kecepatan berselancar di dunia maya.



Penulis : Apriadi S.



Menteri Pertanian Hadiri Launching Gugus Tugas Polri Dukung Ketahanan Pangan

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menghadiri launching Gugus Tugas Polri dalam Mendukung Ketahanan Pangan bertempat di Lahan Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Giri Mukti, Desa Bulakan, Kecamatan Gunungkencana, Kabupaten Lebak, Banten, Rabu 20 November 2024.



Launching Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan, Lebak Banten

Di lokasi yang sama Menteri Pertanian ditemani Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Setyo Budiyanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto, Kapolda Banten Brigadir Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan LMDH Giri Mukti melakukan penanaman jagung secara simbolis. Mentan menyatakan, launching Gugus Tugas Polri dalam mendukung ketahanan pangan merupakan salah satu momentum yang baik. Mentan mengatakan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, kolaborasi merupakan kunci untuk mewujudkan kemandirian pangan. Dalam Program Swasembada Pangan, Kementan, TNI/Polri, Kemendes, dan pihak lainnya akan berkolaborasi untuk mengoptimalkan lahan produktif guna peningkatan produktivitas dan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. “Sekarang ini adalah hari yang baik dan momentum yang baik, untuk kebangkitan pangan sebagai arahan dari Presiden Republik Indonesia untuk mencapai swasembada dalam waktu sesingkat-singkatnya. Beliau memerintahkan 4 tahun swasembada bisa kita rebut kembali”, terangnya saat berada Lahan Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Giri Mukti, Desa Bulakan.

Kapolda Banten menyatakan, kegiatan penanaman benih jagung dimulai dengan 50 hektare terlebih dahulu. “Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, yang ditindaklanjuti oleh jajaran Polda Banten, dengan launching penanaman benih jagung, di atas lahan yang di Lebak ini, seluas 600 hektare. Kali ini mulai dengan 50 hektare terlebih dahulu”, kata Kapolda Banten Brigadir Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Ia mengungkapkan, bahwa ada ribuan lahan yang berlokasi di Banten yang akan digarap untuk ditanam jagung dalam mendukung ketahanan pangan. “Total keseluruhan lahan yang akan digarap seluas 4.325 hektare. Kita akan menggarap di wilayah Banten, yakni di Lebak, Pandeglang dan Serang”, terangnya. Diketahui kegiatan launching digelar secara serentak di seluruh Indonesia. Gugus Tugas Polri ini nantinya akan melaksanakan sejumlah program berkaitan dengan pangan yang mendukung misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.



Menteri Pertanian, Panglima TNI dan Kapolri melaunching Gugus Tugas Mendukung Ketahanan Pangan

Peluncuran gugus tugas Polri juga dihadiri Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang mengikuti peluncuran melalui *video conference* atau virtual di Desa Bulang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Penulis : Rizky Purnama

Bulog Diperkuat, Swasembada Semakin Dekat

Pemerintah telah sepakat untuk melakukan transformasi kelembagaan terhadap Badan Urusan Logistik (BULOG). Status BULOG yang saat ini berada di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), nantinya akan menjadi badan otonom yang berada di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Transformasi kelembagaan Perum BULOG mendapatkan restu dari Presiden Prabowo Subianto, ke depan BULOG akan menjadi badan otonom yang bertanggung jawab langsung pada Presiden untuk memperkuat perannya dalam menjaga pasokan dan harga pangan khususnya beras”, ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat ditemui usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Transformasi Kelembagaan BULOG, di Jakarta, Jumat 29/11/2024. Hadir dalam rapat tersebut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono, Wakil Direktur Perum Bulog Marga Taufiq, serta pejabat terkait lainnya.



Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan memimpin jalannya Rakortas di Bulog

Penguatan BULOG menjadi salah satu terobosan yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan salah satu visi-misi Presiden yaitu Swasembada pangan. “Tentu kita akan diskusi panjang terbatas mungkin melekat pada pendalaman karena kita ingin BULOG itu

betul-betul kuat tetapi jangan hanya kuat tapi enggak bisa jalan, jadi kuat tapi juga bisa jalan semua ini dalam rangka untuk saudara-saudara mencapai program unggulan atau program prioritas yang disampaikan Bapak Presiden kita harus Swasembada pangan”, ujarnya.

Dirinya juga menyampaikan ada beberapa hal yang harus segera dibahas dalam melakukan transformasi BULOG yaitu payung hukum, kepastian anggaran dan fungsi kelembagaan BULOG. Harapannya setelah bertransformasi, BULOG akan menjadi lembaga yang sangat kuat karena bertugas menjadi penyangga pasokan dan stabilisasi harga pangan nasional.



Wakil Menteri Pertanian Sudaryono turut hadir dalam Rakortas di Bulog

Sementara itu Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang turut hadir juga mendukung transformasi BULOG, “Kita dukung BULOG menjadi BULOG yang lebih besar bukan sebagai perusahaan tapi sebagai badan yang mengurus logistik-logistik pangan kita”. Dirinya juga menyampaikan peran BULOG yang lebih luas yaitu sebagai stokis, stabilitator dan distributor, “BULOG itu selain juga adalah stokis tapi juga sebagai penyalur bantuan dan juga sebagai cadangan pangan yang sah, jadi gudangnya terisi berapa itu menjadi cadangan pangan dari pemerintah sehingga kita *clear* dan karena fungsi BULOG itu adalah penstabil ya jadi stokis, penstabil dan penyalur jadi stokis itu sebagai menyimpan, penyalur menyalurkan tapi juga sebagai stabilitator jadi saat panen raya dia harus ngambil hasil panen kemudian panennya disimpan diolah disimpan dan seterusnya”, pungkasnya.

Penulis : Didik Pratama

Mentan Bersama Kapolri dan Panglima TNI

Launching Program
Swasembada Pangan



Mentan Amran bersama Kapolri, dan Panglima TNI bersinergi dalam mengakselerasi pencapaian swasembada pangan dengan meluncurkan program 'Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan' di Lebak Banten.

Dalam Program Swasembada Pangan ini Kementan bersama TNI/Polri, Kemendes, dan pihak lainnya akan berkolaborasi untuk mengoptimalkan lahan produktif guna peningkatan produktivitas dan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan dilanjutkan dengan penanaman benih jaung seluas 600 hektare, ini kita garap mendukung ketahanan pangan, program Gugus Tugas ini bagian dari program swasembada pangan yaitu berperan dalam program perkarangan lahan bergizi dan pemanfaatan lahan produktif melalui kerja sama dengan kelompok tani

Dengan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak, diharapkan dapat mendukung program ketahanan pangan yang tertuang dalam Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran.



53 tahun KORPRI sebagai penggerak bangsa, melayani dengan sepenuh hati, dan mejadi garda terdepan dalam membangun Indonesia.

Dengan tema "KORPRI untuk Indonesia", mari kita wujudkan pelayanan yang profesional, berintegritas, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Kementerian Pertanian bangga menjadi bagian dari perjuangan ini, bersama-sama menjaga ketahanan pangan demi Indonesia yang lebih sejahtera.

Indonesia Memastikan Akses Terhadap Makanan Bergizi Untuk Semua Pada Peluncuran Survei Ekonomi OECD 2024

Indonesia Memastikan Akses terhadap Makanan Bergizi bagi semua untuk masa depan yang sejahtera. Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, B.Eng.,M.M.,MBA, menyampaikan hal tersebut dalam acara peluncuran Survei Ekonomi OECD Indonesia 2024 yang digelar pada Selasa (26/11/2024) di Kantor Pusat Kementerian Keuangan.

Dalam pidatonya, Wamentan menekankan bahwa peluncuran survei ini merupakan bukti nyata dari kemitraan yang kokoh antara Indonesia dan OECD. "Saya ucapkan selamat atas peluncuran Survei Ekonomi OECD Indonesia 2024, sebuah laporan komprehensif yang memberikan perspektif mendalam mengenai situasi ekonomi Indonesia serta isu-isu struktural yang perlu kita tangani", ujarnya.

Wamentan menyoroti bahwa di tengah tantangan ekonomi global yang kompleks, sektor pertanian di Indonesia menyumbang hampir 14% PDB Indonesia, dengan lebih dari 46% penduduk tinggal di daerah pedesaan dan sekitar 31 juta orang terlibat langsung di sektor ini. "Kami telah membuat kemajuan dalam mengurangi prevalensi kekurangan gizi (PoU) menjadi 8,53% pada tahun 2023, di bawah rata-rata global sebesar 9,1%, serta prevalensi stunting pada anak balita, yang menurun dari 24,4% pada tahun 2021 menjadi 21,6% pada tahun 2022, mencapai level terendah dalam lebih dari dua puluh tahun. Namun, tingkat stunting yang tinggi terutama di daerah pedesaan menyoroti kurangnya akses terhadap makanan bergizi, perubahan iklim, ketegangan geopolitik, kenaikan harga pangan, dan kesenjangan ekonomi semakin memperburuk masalah ini", jelasnya. "Menanggapi tantangan ini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia berupaya mencapai kedaulatan pangan sebuah visi di mana negara kita dapat memproduksi, mengolah, dan mendistribusikan pangan yang cukup untuk semua orang, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor", tambah Wamentan.

Dalam kesempatan tersebut, Wamentan menegaskan komitmen pemerintah Indonesia dalam mencapai kedaulatan pangan nasional dan berkontribusi terhadap ketahanan pangan global. "Kami memiliki visi menjadi negara yang dapat memproduksi, mengolah, dan mendistribusikan pangan yang cukup untuk semua orang, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor", ungkapnya.

Wamentan juga menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia khususnya Generasi Milenial dan Generasi Z terhadap transisi pertanian tradisional menuju pertanian modern yang lebih efisien dan berbasis

teknologi yang dapat mengurangi biaya produksi hingga 50 persen sekaligus meningkatkan hasil panen hingga 100 persen. Prioritas pemerintah pengembangan sumber daya manusia sektor pertanian adalah solusi inovatif, teknik adaptif, dan penggunaan perangkat digital.

Wamentan mengapresiasi dukungan OECD dan Sekretaris Jenderal Matthias Cormann dalam mendukung transformasi ekonomi Indonesia. "Kami berharap dapat terus berkolaborasi dengan OECD untuk mempercepat upaya kami khususnya Kementerian Pertanian dalam mengubah Indonesia menjadi negara yang berdaulat pangan", tuturnya.

Peluncuran Survei Ekonomi OECD Indonesia 2024 ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi Indonesia dalam melanjutkan agenda reformasi dan mewujudkan negara yang dapat memproduksi, mengolah, dan mendistribusikan pangan yang cukup untuk semua orang, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor.



Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjadi keynote speech pada Peluncuran Laporan OECD Economic Survey of Indonesia 2024

Penulis : Rahma Andany

Mohon Kesediaannya Untuk Mengisi Survei Kepuasan



Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian

bit.ly/surveipusdatin